



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ALIMIN SUPRAYITNO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **217957**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **173.618.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 38.518.000
2. Tanah Seluas 297 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 29.700.000
3. Tanah Seluas 229 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 22.900.000
4. Tanah Seluas 1046 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 82.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **447.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI L300 PICK UP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOTOR, YAMAHA N - MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **168.400.000**

D. SURAT BERTHARGA

Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **297.107.427**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **----**

Sub Total

Rp. **1.086.125.427**



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.086.125.427

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.